

# REDENOMINASI dan KEPANIKAN SOSIAL<sup>1</sup>

Dr. Arif Budimanta<sup>2</sup>

Redenominasi seperti yang diwacanakan oleh BI pada saat ini adalah upaya pemotongan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya terhadap barang atau pun jasa. Harga barang dan jasa akan mengikuti perubahan nilai (denominasi) mata uang tersebut.

Hingga saat ini, mata uang Republik Indonesia dengan pecahan tertingginya sebesar Rp 100.000, merupakan pecahan mata uang terbesar kedua di dunia setelah Vietnam dengan pecahan mata uang tertingginya 500.000 Dong Vietnam.

Sejumlah negara sudah melakukan redenominasi mata uangnya. Di antaranya adalah Rumania dan Turki. Rumania memotong 4 (empat) digit nominal mata uangnya. Sedangkan Turki memotong 6 (enam) digit, yang membutuhkan waktu 10 tahun masa transisi penerapan yang dilakukan dengan disiplin fiskal yang ketat.

Sekilas tidak ada masalah dengan kebijakan itu. Namun, bagi Indonesia, saya memiliki catatan tersendiri untuk rencana kebijakan yang mengejutkan dan mengundang kontroversi ini:

## **Redenominasi: Sedikit Manfaat Banyak Biaya.**

Redenominasi mata uang rupiah memang memiliki sedikit manfaat antara lain sedikit mempermudah transaksi perdagangan dan penghitungan transaksi keuangan dengan nominal yang lebih sedikit. Juga, sedikit membantu mempersiapkan jika di masa akan datang dilakukan single currency di wilayah ASEAN, bahkan ASIA. Namun Biaya dan dampak yang akan dihadapi jauh lebih besar dari sedikit manfaat di atas. Dampak yang kemungkinan besar akan muncul jika Redenominasi dipaksa untuk diberlakukan antara lain :

1. BIAYA LANGSUNG. Yakni berupa biaya sosialisasi, penarikan uang lama, dan pencetakan serta pendistribusian uang dengan nominal baru mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar.

2. INFLASI. Redenominasi rupiah tidak akan berpengaruh terhadap inflasi jika diasumsikan seluruh masyarakat akan mengerti dan menerima rencana ini. Pada kenyataannya, tidak akan mudah mensosialisasikan rencana ini kepada masyarakat dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi, tingkat pendidikan masih rendah, dan akses terhadap informasi yang masih terbatas. Sehingga rencana redenominasi akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan justru inflasi yang tinggi. Ditambah lagi tidak ada yang bisa menjamin harga akan tunduk mengikuti rencana redenominasi ini, karena pengalaman juga menunjukkan pengendalian harga yang dilakukan pemerintah masih sangat lemah. Sehingga jika dilakukan redenominasi harga akan bertahan pada posisinya dan inflasi yang tinggi tidak bisa dihindarkan.

---

<sup>1</sup> Artikel dimuat Di harian Kontan, Jumat 13 Agustus 2010

<sup>2</sup> Anggota DPR RI, Komisi Keuangan dan Perbankan

3. Biaya pembuatan undang-undang baru dan revisi Undang-undang. Jika rencana redenominasi rupiah ini dipaksakan untuk dilakukan, akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit dalam hal membuat undang-undang khususnya yang mengatur pelaksanaan redenominasi tersebut mengingat pasal 23B UUD 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. serta biaya untuk revisi undang-undang maupun peraturan lainnya yang didalamnya mengandung nilai nominal seperti besaran denda dan sebagainya.

4. Biaya Kepanikan Sosial dan Instabilitas Moneter. Redenominasi menimbulkan biaya berupa kepanikan sosial bahkan sejak kemarin (ketika Gubernur Bank Indonesia terpilih melakukan konferensi pers). Ingat, kita punya pengalaman buruk dengan sanering. Jika tidak diredam, justru menimbulkan ketidakstabilan moneter. Padahal, menjaga stabilitas moneter sudah menjadi tugas BI, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2009 (UU Bank Indonesia) khususnya mengenai tugas BI mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan terjadinya kepanikan, sangat mungkin masyarakat berbondong-bondong membeli dolar (US\$) sehingga Rupiah akan terdepresiasi.

### **Tidak ada urgensi**

Karena itulah, untuk saat ini menurut saya redenominasi tidak memiliki urgensi. Termasuk, walau sekadar wacana. Seperti kita rasakan, sekarang ini sentimen masyarakat terhadap pemerintah sedang tidak baik yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai atau kekecauan pada pemakaian tabung gas 3 kilogram. Wacana redenominasi juga ikut menekan posisi pemerintah di mata masyarakat.

Selain itu, redenominasi memang tidak memiliki urgensi mengingat situasi perekonomian dunia yang masih fluktuasi dan belum lepas dari krisis, kondisi perekonomian dalam negeri yang masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan inflasi yang ada (tanpa redenominasi) saja sudah cukup tinggi, sehingga tidak relevan untuk menambah persoalan baru berupa denominasi rupiah.